

---

**EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN PRESIDEN PRODUKTIF UNTUK  
USAHA MIKRO (BPUM) KEPADA PELAKU USAHA TERDAMPAK  
COVID-19 DI DESA HUTA PADANG KECAMATAN  
BANDAR PASIR MANDOGE**

Wiwien Swarlina<sup>1</sup>, Asima Yanty Sylvania Siahaan<sup>2</sup>

Universitas Sumatera Utara, Medan

e-mail: [wiwien.swarlina99@gmail.com](mailto:wiwien.swarlina99@gmail.com)<sup>1</sup>, [asimayantysiahaan@gmail.com](mailto:asimayantysiahaan@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstract:** *The Productive Presidential Assistance Program for Micro Enterprises (BPUM) is the government's effort in order to help micro-entrepreneurs maintain their businesses during the COVID-19 pandemic. This study aims to find out and describe the Effectiveness of the Productive Presidential Assistance Program for Micro Enterprises (BPUM) to Business Actors Affected by COVID-19 in Huta Padang Village, Bandar Pasir Mandoge District. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques are carried out by interviews, observations and documentation. The results showed that the Effectiveness of the Productive Presidential Assistance Program for Micro Enterprises (BPUM) to Business Actors Affected by COVID-19 in Huta Padang Village, Bandar Pasir Mandoge District, has not been effective. This can be seen from the data collection carried out still does not meet the accuracy of the program targets because the program manager does not have data on micro-business actors before and after the COVID-19 pandemic. In addition, the quality of the organizational climate between program managers is not doing well due to lack of communication and inadequate facilities. Thus, the interrelationship of these elements results in inaccuracy of program objectives, lack of performance of program managers, and non-achievement of program objectives.*

**Keywords:** : Impact of COVID-19, Micro Business Actors, Effectiveness, BPUM.

**Abstrak:** Program Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) merupakan upaya pemerintah dalam rangka membantu pelaku usaha mikro mempertahankan usahanya di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Efektivitas Program Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) kepada Pelaku Usaha Terdampak COVID-19 di Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Program Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) kepada Pelaku Usaha Terdampak COVID-19 di Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge belum efektif. Hal ini dilihat dari pendataan yang dilakukan masih belum memenuhi ketepatan sasaran program dikarenakan pengelola program tidak memiliki data pelaku usaha mikro sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Selain itu, kualitas iklim organisasi antar pengelola program sangat tidak berjalan dengan maksimal karen tidak adanya komunikasi dan fasilitas yang tidak memadai. Dengan demikian, keterkaitan dari unsur-unsur tersebut mengakibatkan ketidaktepatan sasaran program, kurangnya kinerja pengelola program, dan tidak tercapainya tujuan program.

**Kata kunci:** Dampak COVID-19, Pelaku

## PENDAHULUAN

Sekarang ini, berbagai negara di seluruh dunia sedang mengalami kesulitan akibat sebuah virus yang dikenal dengan nama Corona Virus Disease (COVID-19). Salah satu negara yang menerima dampak negatif dari keberadaan virus ini adalah negara Indonesia karena virus ini perekonomian indonesia terkena dampak yang cukup besar. Dampak negatif COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia sangat besar. Perekonomian sendiri merupakan faktor yang sangat oenting untuk kehidupan sehari-hari manusia

Oleh karena itu, keberadaan COVID-19 di Indonesia memberikan dampak negatif yang cukup banyak dalam pelaksanaan kegiatan perekonomian. Dampak yang ditimbulkan akibat keberadaan COVID-19 terhadap perekonomian adalah menyebabkan harga komoditas turun, melemahnya konsumsi rumah tangga, dan menurunnya daya beli masyarakat (Fikri, 2021).

Penularan virus COVID-19 yang sangat cepat mengakibatkan dampak pada pemperburuk perekonomian yang ada dunia maupun di indonesia. Khofifah (2020:1328) dalam penelitiannya mengatakan bahwa banyak pelaku UMKM yang menutup toko dan meliburkan karyawannya dikarenakan penurunan omzet penjualan akibat COVID-19. Penurunan omzet penjualan disebabkan oleh pemberlakuan physical distancing dan penerapan PSBB.

Sektor UMKM yang paling banyak terdampak COVID-19 adalah makanan dan minuman. Bahtiar (2021:20) mengatakan dalam penelitiannya bahwa sebanyak 63,9% dari UMKM yang terdampak COVID-19 mengalami penurunan omzet lebih dari 30%. Berdasarkan survei Katadata Insight Center (KIC) pelaku UMKM berusaha melakukan upaya untuk mempertahankan kondisi usahanya, seperti mengurangi jam kerja dan jumlah karyawan, menurunkan produksi barang/jasa, menambah saluran pemasaran sebagai bagian strategi

bertahan (Katadata, 2020). Selain itu, berdasarkan hasil survey dari beberapa lembaga seperti BPS, Bappenas, dan World Bank menghasilkan bahwa banyak pelaku UMKM kesulitan untuk melunasi pinjaman serta membayar tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan akibat pandemi COVID-19. Bahkan beberapa diantara pelaku UMKM tersebut terpaksa sampai harus melakukan PHK terhadap karyawannya (Bahtiar, 2021:20).

Program (BPUM) memiliki tujuan yang sangat mulia yakni membantu pemilik usaha mikro untuk mempertahankan usaha mereka di tengah krisis pandemi COVID-19. Namun, tujuan mulia pemerintah tersebut tidak dapat direalisasikan dengan baik dikarenakan ulah pengelola program yang tidak kompeten dan akuntabel dalam melaksanakan tugas yang diberikan (Rezkisari, 2020).

Program (BPUM) untuk pelaku usaha mikro dan koperasi dalam bentuk Banpres produktif dinilai tidak tepat sasaran. Menurut Ketua Asosiasi Kader Sosio-ekonomi Strategis (AKSES) pelaksanaan program Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) realisasinya belum sampai kepada pelaku usaha mikro dan Kementerian Koperasi dan UKM terlihat tidak menjalankan fungsinya dengan baik serta kerjanya dinilai sangat lamban sehingga mengakibatkan dampak perlambatan ekonomi semakin serius (Rezkisari, 2020). Permasalahan target sasaran program yang tidak tepat muncul dikarenakan pendataan yang dilakukan tidak akurat (Wareza & Putri, 2020).

Permasalahan-permasalahan terkait ketidak efektifan Program (BPUM) yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat tidak hanya terletak pada masalah pendataan dan sasaran program yang tidak tepat, melainkan juga terdapat masalah kurangnya aksesibilitas masyarakat untuk mendapatkan program bantuan seperti yang terjadi di Desa Sei Mati Kota Medan (Daulay, 2020). Selain di Kota Medan, juga terdapat masalah ketidakefektifan Program (BPUM) di

Kota Kisaran Kabupaten Asahan yaitu kurangnya pemberitahuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Desa terkait program bantuan tersebut sehingga mengakibatkan masyarakat merasa kebingungan dan ragu untuk mengurus persyaratan dalam mendapatkan program bantuan tersebut (Sentralberita, 2020).

Salah satu daerah di kabupaten Asahan yang melaksanakan Program (BPUM) adalah Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge. Berdasarkan hasil pra-penelitian peneliti di Desa Huta Padang, Program (BPUM) di Desa Huta Padang dikelola oleh Kepala Dusun dan Kepala Desa. Selain itu, berdasarkan hasil pra-penelitian dengan masyarakat di Desa Huta Padang, mereka mengatakan bahwa masalah pada Program (BPUM) adalah pendataan peserta program yang tidak dilakukan oleh Kepala Dusun. Hal tersebut kemudian mengakibatkan masyarakat yang tidak benar-benar memiliki usaha dan tidak memenuhi kriteria dapat mendaftarkan diri dan menerima program (BPUM) di Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge.

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas , maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang efektivitas program Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) di Desa Huta Padang. Maka dalam penelitian ini, Penulis mengambil judul “Efektivitas Program Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) Kepada Pelaku Usaha Terdampak COVID-19 di Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge”.

## METODE

Penulis menggunakan bentuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam melakukan penelitian ini. Adapun pendekatan deskriptif kualitatif menurut Bungin (2007:68) bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi, atau fenomena realita sosial yang terjadi di masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini akan menjelaskan gambaran realitas dari masalah yang akan dielaborasi oleh peneliti dengan menggunakan data-data yang ada. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge yang beralamatkan di Jalan Besar Mandoge, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara 21262. Adapun untuk pengumpulan data, penulis menggunakan metode wawancara mendalam dan observasi. Sementara untuk memperoleh informasi yang akurat, penulis menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan informan penelitian. Adapun kriteria informan peneliti adalah pemangku kepentingan dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki peran untuk bersinergi mewujudkan Program Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM). Sehingga informan penelitian yang dipilih adalah Kepala Desa Huta Padang, Sekretaris Desa Huta Padang, Sejumlah Kepala Dusun di Desa Huta Padang, Kepala Bagian UMKM Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan, pelaku usaha mikro sebagai sasaran program ini. Setelah informasi dikumpulkan, maka penulis akan melakukan analisis data. Teknis analisis data yang dilakukan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif dimana jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Sementara untuk teknik keabsahan data, penulis menggunakan jenis triangulasi data. Teknik triangulasi data dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi antara subjek penelitian yang satu dengan yang lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI telah mengeluarkan program (BPUM) dengan tujuan untuk membantu pelaku usaha mikro menjalankan dan mempertahankan

usahaannya di tengah krisis pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Program (BPUM) tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 6 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 2 Tahun 2021 Tentang pelaksanaan Program Pemulihian Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan dalam penyelamatan ekonomi nasional.

Salah satu kabupaten yang berada di Sumatera Utara yang juga melaksanakan Program (BPUM) adalah Kabupaten Asahan melalui Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait program (BPUM) di Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge merupakan salah satu lokasi program (BPUM) yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan. Struktur organisasi di Desa Huta Padang dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Sekretaris Desa, Kepala Urusan perencanaan, Kepala Urusan umum, Kepala Urusan keuangan, Kepala Seksi kesejateraan sosial, Kepala Seksi pemerintahan, Kepala Seksi pelayanan, dan sembilan Kepala Dusun serta diawasi oleh Badan Pengawas Desa (BPD). Selanjutnya, dalam penelitian ini Efektivitas Program (BPUM) kepada Pelaku Usaha Terdampak COVID-19 di Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge dikaji berdasarkan dimensi efektivitas yang dikemukakan oleh Richard. M. Steers yang terdiri dari karakteristik organisasi, karakteristik lingkungan, dan kebijakan praktik manajemen.

#### 1. Karakteristik Organisasi

Karakteristik organisasi terbagi ke dalam dua bagian yaitu struktur organisasi dan teknologi. (Schernerhorn (dalam Sutrisno (2010:126)). Teknologi adalah suatu

alat, perbuatan, pengetahuan, teknik yang digunakan oleh manusia untuk mengubah input menjadi output. Teknologi dapat dikatakan berpengaruh dalam efektivitas program apabila dapat dibandingkan dengan teknologi lainnya (Sutrisno, (2010:125)).

2. Struktur Organisasi Salah satu variabel yang dapat mengukur efektivitas program dalam struktur organisasi adalah spesialisasi fungsi atau pembagian tugas. Spesialisasi fungsi adalah pembagian tugas kerja pegawai di dalam suatu organisasi menjadi khusus sesuai dengan keperluan pelaksanaan program kegiatan. Pembagian fungsi atau tugas yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program di sebuah organisasi dapat berpengaruh secara signifikan dalam efektivitas program. Hal tersebut dikarenakan pelaksanaan program dapat menjadi lebih terperinci, detail dan tersusun dengan rapi sehingga tidak menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan program yang dilaksanakan. Struktur organisasi di Desa Huta Padang dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Sekretaris Desa, Kepala Urusan perencanaan, Kepala Urusan umum, Kepala Urusan keuangan, Kepala Seksi kesejateraan sosial, Kepala Seksi pemerintahan, Kepala Seksi pelayanan, dan sembilan Kepala Dusun serta diawasi oleh Badan Pengawas Desa (BPD).

Hasil observasi peneliti di Desa Huta Padang melihat bahwa benar Kepala Dusun di Desa Huta Padang yang pertama kali menyediakan formulir pendaftaran kepada setiap pelaku usaha mikro di Desa Huta Padang akan tetapi tidak dilakukan pendataan dan penyaringan terhadap pelaku usaha yang mengambil formulir pendaftaran kepada Kepala Dusun. Kemudian pelaku usaha mikro diberitahukan untuk melengkapi berkas-berkas seperti fotokopi KTP, fotokopi KK dan foto usaha. Data-data yang telah

dikumpulkan kepada Kepala Dusun tersebut akan diserahkan kepada Kantor Kepala Desa oleh setiap Kepala Dusun agar dapat diperiksa dan dilakukan pengecekan data untuk melihat sudah memenuhi syarat dan kriteria yang berlaku atau belum

A photograph of a white rectangular form titled "FORMULIR PENDAFTARAN BANTUAN USAHA MIKRO". The form contains seven numbered fields for填写 (filling in):

1. Nama : \_\_\_\_\_
2. NIK : \_\_\_\_\_
3. No. NB/BLMK : \_\_\_\_\_
4. Alamat Lengkap : \_\_\_\_\_
5. Alamat Usaha : \_\_\_\_\_
6. Bidang/Jenis Usaha : \_\_\_\_\_
7. No. HP/WA : \_\_\_\_\_

**Gambar. Formulir Pendaftaran Program BPUM**

Gambar di atas merupakan formulir pendaftaran Program Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) yang disediakan oleh setiap Kepala Dusun di Desa Huta Padang dan harus dipenuhi oleh setiap penggunausaha mikro yang ingin mendaftarkan dirinya sebagai peserta Program (BPUM) di Desa Huta Padang. Terkait surat izin usaha yang terdapat di formulir pendaftaran bantuan usaha mikro dan harus diisi oleh pelaku usaha mikro, Bapak Dahlan Sirait selaku Kepala Desa dan Kepala Dusun I, II, V,VII mengatakan bahwa setiap pelaku usaha mikro yang ingin mendaftar sebagai calon peserta program BPUM di Desa Huta Padang, maka harus mengurus surat keterangan izin usaha di Kantor Kepala Desa Huta Padang. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha mikro yang ingin mendaftar program BPUM di Desa Huta Padang diharuskan untuk mengurus surat keterangan izin usaha pada Kantor Kepala Desa Huta Padang agar dapat mendaftar sebagai peserta program BPUM di Desa Huta Padang.

Pembagian tugas pada pelaksanaan Program (BPUM) di Desa Huta Padang yang telah dijelaskan sebelumnya bertujuan agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih baik dan teratur sehingga membantu tercapainya target sasaran

program apabila dilakukan pembagian tugas dalam pendataan di masing-masing dusun di Desa Huta Padang. Namun, pada pelaksanaannya target sasaran Program (BPUM) di Desa Huta Padang belum tepat sasaran. Hal tersebut dikarenakan masih ditemukan pelaku usaha yang tidak sesuai kriteria usaha mikro mendapatkan Program (BPUM) di Desa Huta Padang. Ketepatan sasaran program menurut Budiani (2007:7) adalah sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun pada Program(BPUM) di Desa Huta Padang kriteria penerima program yang telah ditetapkan dalam Permenkop No. 6 Tahun 2020 yaitu WNI, memiliki NIK, dan memiliki usaha mikro.

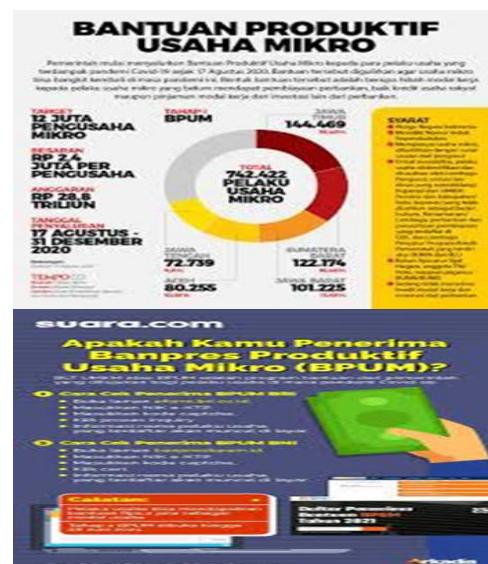
Hasil observasi yang peneliti lakukan di Desa Huta Padang yaitu peneliti melihat sasaran program di Desa Huta Padang belum tepat sasaran. Hal itu terlihat dari pelaku usaha yang tidak memenuhi kriteria peserta program Ba(BPUM) tetapi bisa menerima program bantuan tersebut, seperti usaha yang sudah cukup besar untuk dikatakan sebagai usaha mikro. Kemudian berdasarkan pengamatan peneliti Kepala Dusun di Desa Huta Padang tidak melakukan pendataan dan tidak dilihat apakah pelaku usaha yang mengambil formulir dan mendaftar sudah memenuhi kriteria atau belum. Kepala Dusun hanya memberitahukan kepada pelaku usaha untuk mengambil formulir dan tidak memeriksa kembali kebenaran usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut. Selain itu, hasil pengamatan peneliti juga melihat sebagian besar formulir pendaftaran Program (BPUM) di Desa Huta Padang diberikan kepada sanak saudara Kepala Dusun yang berdasarkan pengamatan peneliti kriteria pelaku usahanya belum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perilaku dan tindakan Kepala Dusun tersebut mengakibatkan ketidaktepatan sasaran untuk program ini. Berdasarkan pengamatan penis dilapangan dappat dikatakan bahwa pelaksanaan Program (BPUM) dalam hal pembagian tugas belum berjalan dengan

baik. Pembagian tugas yang dilakukan oleh pemerintah Desa Huta Padang bertujuan agar pendataan yang dilakukan lebih akurat dan lebih mudah sehingga target sasaran program dapat tercapai. Namun, ternyata tujuan mulia tersebut tidak terealisasi dengan baik akibat kelalaian Kepala Dusun di Desa Huta Padang yang tidak mendata dan memeriksa pelaku usaha mikro yang berada di dusunnya dengan lebih baik lagi. Pendataan peserta ) di Desa Huta Padang seharusnya dilakukan dengan sangat ketat dan terperinci agar meminimalisir terjadinya ketidaktepatan sasaran program. Kepala Dusun yang seharusnya lebih mengetahui warga dusunnya harus melakukan penyaringan terlebih dahulu untuk masyarakat yang akan mengambil formulir pendaftaran dan pengumpulan berkas serta tidak mendahulukan kepentingan pribadinya dalam pelaksanaan program.

3. Teknologi Teknologi yang canggih merupakan salah satu pencapaian luar biasa yang dilakukan oleh manusia. Kemudahan untuk mengakses dan menggunakan teknologi di manapun dan kapanpun manusia berada merupakan salah satu dampak positif keberadaan teknologi. . Salah satu contohnya adalah dalam pelaksanaan program Mikro (BPUM) di Desa Huta Padang dapat dimudahkan dengan adanya peran teknologi yang canggih. Teknologi yang semakin canggih membantu Pemerintah Desa dalam melakukan pendataan peserta program dan penyaluran program (BPUM) kepada pelaku usaha tanpa harus mengumpulkan masyarakat di suatu tempat pada masa pandemi COVID-19.

Aplikasi whatsapp merupakan teknologi yang digunakan oleh Pemerintah Desa Huta Padang dalam pelaksanaan Program (BPUM) di Desa Huta Padang dan berkomunikasi dalam memberikan informasi-informasi terkait Programl

(BPUM). Pemerintah Desa Huta Padang membuat grup whatsapp khusus perangkat Desa Huta Padang dengan tujuan agar dapat memberikan informasi dan menjalin komunikasi yang baik dengan sesama perangkat Desa Huta Padang. Hal tersebut dilakukan agar kapanpun dan dimanapun perangkat desa berada tetap dapat mengetahui kabar dan informasi terbaru dari Kantor Kepala Desa Huta Padang terutama terkait Program Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) yang dilakukan di Desa Huta Padang seperti mengirimkan flyer dan gambar terkait Program (BPUM) dari google maupun internet.



**Gambar. Flyer dan Informasi terkait Program BPUM**

Gambar di atas merupakan contoh flyer dan informasi-informasi yang dikirimkan dan dibagikan oleh Pemerintah Desa Huta Padang pada grup whatsapp yang digunakan untuk saling berbagi informasi. Selain itu, gambar di atas juga gambar yang dapat diakses oleh seluruh pelaku usaha mikro yang ingin mencari tahu terkait Program (BPUM) di google maupun media sosial lainnya.

Penggunaan teknologi yang digunakan oleh Pemerintah Desa Huta Padang dalam pelaksanaan Program (BPUM) di

Desa Huta Padang hanya menggunakan sosial media whatsapp untuk saling mengirimkan kabar terkait Program (BPUM) dan menggunakan teknologi seperti laptop terkhusus software berbentuk microsoft untuk menginput data peserta program yang mendaftar program Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) di Desa Huta Padang. Namun, walaupun begitu penggunaan teknologi yang dipakai oleh Pemerintah Desa sudah lebih baik daripada tidak menggunakan teknologi sama sekali. Selain itu, tanpa adanya teknologi media sosial seperti whatsapp, maka Pemerintah Desa Huta Padang juga akan kesulitan untuk saling memberi kabar dan informasi di masa pandemi COVID-19.

Hasil observasi peneliti melihat bahwa Pemerintahan Desa Huta Padang belum terlalu paham dengan teknologi-teknologi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan program (BPUM) di Desa Huta Padang. Pemerintah Desa Huta Padang hanya menggunakan handphone dan software dari laptop seperti microsoft excel untuk mendata dan microsoft word untuk membuat surat keterangan usaha kepada pelaku usaha yang membutuhkan. Oleh karena itu, penggunaan teknologi dalam pelaksanaan program (BPUM) di Desa Huta Padang sudah berjalan dengan baik hanya saja perlu dilakukan peningkatan agar lebih baik lagi.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan pengamatan dilapangan yang penulis telah lakukan, dapat dikatakan bahwa penggunaan teknologi dalam pelaksanaan program Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro di Desa Huta Padang sudah sangat maksim. Hal ini dapat ketahui dari penggunaan teknologi yang digunakan oleh pengelola program Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro di Desa Huta Padang yaitu seperti laptop, handphone, dan penggunaan software dari laptop yakni Microsoft word dan Microsoft excel dalam melakukan pendataan dan pembuatan surat menyurat pada pelaksanaan program Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro di

Desa Huta Padang.

## 2. Karakteristik Lingkungan

Karakteristik lingkungan terbagi atas dua bagian yaitu lingkungan ekstern (luar) dan lingkungan intern (dalam). Steers (1985:101) mengatakan bahwa lingkungan ekstern (luar) yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Salah satu contoh keputusan yang diambil akibat adanya pengaruh lingkungan luar adalah munculnya suatu program. Selain itu, Steers (1985:101) juga mengatakan bahwa lingkungan intern akan menciptakan budaya dan sosial tempat berlangsungnya suatu program. Faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan program di dalam suatu organisasi.

### Lingkungan Ekstern (Luar)

Lingkungan ekstern merupakan lingkungan yang berada di luar kesatuan atau organisasi dalam hal menciptakan dan mengambil keputusan. Program (BPUM) dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI kepada seluruh pelaku usaha mikro melalui seluruh Dinas Koperasi dan UMKM di Indonesia akibat krisis ekonomi di tengah Munculnya virus corona 19 yang mengakibatkan pelaku usaha mikro mengalami penurunan omzet dan pendapatan karena tidak dapat melakukan transaksi jual beli secara langsung.

Program Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) di Desa Huta Padang muncul karena keberadaan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Dampak COVID-19 tersebut menyebabkan pelaku usaha di seluruh daerah di Indonesia mengalami penurunan omzet dan pendapatan. Salah satunya adalah Kabupaten Asahan dan terkhusus Desa Huta Padang.

Dari Hasil observasi peneliti di Desa Huta Padang terkait lingkungan ekstern yang berpengaruh terhadap munculnya Program (BPUM) di Desa Huta Padang adalah benar bahwa program tersebut muncul karena adanya pandemi COVID-19 yang membuat pelaku usaha mikro di Desa Huta Padang kesulitan

memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari akibat menurunnya omzet dan pendapatan mereka. Peneliti juga melihat bahwa di berbagai penjuru dunia termasuk negara Indonesia dari social media, google, siaran radio dan televisi bahwasanya dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Hal tersebut kemudian menyebabkan banyaknya program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meminimalisir dampak negatif dari Corona Virus Disease 2019. Pemerintah Desa kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan Program (BPUM) tersebut agar dapat tercapai tujuan dan sasaran program tersebut.

### **lingkungan Intern (Dalam)**

keberadaan lingkungam dalam sendiri tepat di dalam organisasi dan lebih dikenal dengan iklim organisasi. Pengaruh lingkungan intern (dalam) terhadap efektivitas program yang dilaksanakan di dalam suatu organisasi adalah pada kualitas iklim organisasi yang berjalan di dalam organisasi. Iklim organisasi yang baik dan berkualitas berpengaruh pada kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh pengelola program. Iklim organisasi yang lebih mementingkan pegawai dengan komunikasi terbuka, saling mendukung, dan desentralisasi keputusan biasanya akan menghasilkan peningkatan prestasi kerja (Frederickso, dkk (dalam Steers, 1985:129)). Pelaksanaan suatu program di dalam sebuah organisasi dapat tercapai apabila pengelola program menciptakan iklim yang menekankan pentingnya pencapaian tujuan dan memberikan dukungan bersama, kerjasama dan partisipasi pada kegiatan atau program yang dapat membantu dalam pencapaian tujuan (Steers, 1985:129).

Steers (1985:130) mengatakan “iklim merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatkan kualitas pegawai, kepuasan pegawai dan prestasi pegawai”. Pengelola program sebagai pegawai di dalam suatu organisasi yang disebut Kantor Kepala Desa

membutuhkan iklim organisasi yang sesuai dengan kebutuhan pegawai desa agar dapat meningkatkan kualitas kinerja mereka dalam melaksanakan program yang dilakukan di Desa. Iklim yang paling diinginkan dalam pencapaian sasaran program di sebuah organisasi adalah iklim yang mementingkan pencapaian tujuan yang dapat mendorong hubungan saling tukar menukar antara pegawai dengan atasan dalam rangka mencapai sasaran program dalam jangka panjang (Steers, 1985:131).

Pelaksanaan program (BPUM) di Desa Huta Padang dilakukan oleh Pemerintah Desa Huta Padang. Pemerintah Desa Huta Padang bergerak di dalam suatu organisasi yang disebut dengan Kantor Desa Huta Padang. Dalam organisasi Desa tersebut tentunya memiliki atasan dan bawahan yang saling bahu membahu bekerja untuk mencapai tujuan segala kegiatan dan program yang dilaksanakan di Desa Huta Padang. Dalam rangka pencapaian tujuan program (BPUM) di Desa Huta Padang, maka atasan yang dalam hal ini adalah Kepala Desa bertanggungjawab untuk membangun iklim organisasi yang berorientasi pada pencapaian tujuan program. Iklim organisasi yang dibangun oleh Kepala Desa harus mementingkan kebutuhan dan keinginan daripada bawahannya yang dalam hal ini adalah para Kaur, Kasi dan Kepala Dusun agar dapat memicu tumbuhnya iklim organisasi yang baik.

Komunikasi yang berusaha dibangun dengan baik oleh Kepala Desa Huta Padang dalam rangka meningkatkan iklim organisasi adalah dengan memberikan informasi terkait segala kegiatan yang dilaksanakan di Desa Huta Padang melalui media whatsapp grup dan juga pada saat rapat yang diadakan di Kantor Desa Huta Padang. Namun, perangkat desa di Kantor Desa Huta Padang terkhususnya Kepala Dusun masih menganggap bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Kepala Desa masih kurang untuk membangun iklim organisasi yang baik. Hasil wawancara

dengan Bapak Purasa, Bapak Mangapon dan Bapak Marudut Sinurat selaku Kepala Dusun mengatakan bahwa jumlah Kepala Dusun yang cukup banyak membuat komunikasi yang dilakukan oleh Kepala Desa tidak merata karena tidak semua Kepala Dusun paham dalam menggunakan teknologi media sosial. Selain itu, Bapak Jhonliper Manurung bahwasanya fasilitas yang dimiliki oleh Kantor Kepala Desa Huta Padang masih kurang memadai.

Hasil observasi peneliti di Desa Huta Padang melihat bahwasanya benar fasilitas dan kondisi bangunan Kantor Kepala Desa Huta Padang memang kurang memadai untuk menghasilkan kinerja pegawai yang berkualitas. Kondisi bangunan Kantor Kepala Desa apabila dibandingkan dengan Kantor-Kantor Kepala Desa lainnya di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge masih tergolong sangat minim sekali. Di dalam Kantor Kepala Desa Huta Padang masih ditemui sampah dan berkas-berkas yang tidak tersusun dengan rapi. Selain itu, di dalam Kantor Kepala Desa Huta Padang udaranya sangat panas karena plafon yang sangat rendah dan kipas angin yang tidak berfungsi serta kurangnya perawatan yang dilakukan di Kantor Desa Huta Padang menyebabkan banyaknya debu dan udara yang dihirup tidak segar. Oleh karena itu, kurang memadainya fasilitas, kondisi Kantor Kepala Desa yang kurang perawatan serta komunikasi yang kurang baik antar perangkat desa menyebabkan kinerja pegawai Desa Huta Padang kurang baik karena kondisi tempat bekerja yang tidak mendukung untuk menghasilkan kinerja yang berkualitas.

Dari hasil wawancara dan pengamatan yang penulis lakukan, dapat diketahui bahwa iklim organisasi di Kantor Kepala Desa Huta Padang masih belum berjalan dengan baik sehingga mengakibatkan efektivitas program (BPUM) di Desa Huta Padang tidak tercapai. Iklim organisasi yang ideal dan harus dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Huta Padang adalah dengan membangun komunikasi yang baik antara

atasan yang dalam hal ini adalah Kepala Desa dengan bawahan yang dalam hal ini adalah perangkat desa dan semua Kepala Dusun di Desa Huta Padang. Selain itu, fasilitas dan ruangan di Kantor Kepala Desa Huta Padang juga harus diperbaiki menjadi lebih baik lagi agar dapat meningkatkan kualitas kerja perangkat Desa Huta Padang. Namun, iklim organisasi di Kantor Kepala Desa Huta Padang masih belum baik. Kurangnya komunikasi yang baik antar perangkat desa di Kantor Kepala Desa Huta Padang, kondisi Kantor Desa Huta Padang dan fasilitas yang kurang memadai mengakibatkan kualitas kinerja perangkat Desa Huta Padang kurang baik, serta Kepala Dusun di Desa Huta Padang sulit untuk menemui dan menghubungi Kepala Desa pada saat ingin membahas terkait pendataan Program (BPUM) ini di Desa Huta Padang sehingga Kepala Dusun menjalankan tugas mereka sekadarnya saja sesuai dengan pemahaman mereka. Oleh karena itu, diharapkan Kepala Desa Huta Padang dapat membangun komunikasi yang lebih baik dengan para Kepala Dusun dan perangkat desanya serta meningkatkan kualitas fasilitas dan ruangan di Kantor Kepala Desa Huta Padang.

### **Kebijakan Praktek Manajemen**

Kebijakan Praktek Manajemen mencakup dua bagian yaitu pencapaian tujuan program dan komunikasi. Pencapaian tujuan adalah segala proses dan upaya yang dilakukan dalam pencapaian suatu tujuan (Duncan (dalam Steers (1985:53)). Pencapaian tujuan program berarti bahwa untuk melihat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan program dapat dilihat dari kesanggupan manajemen untuk menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dikejar serta melihat ketepatan sasaran program agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan komunikasi menurut Steers (1985:174) adalah sarana yang dibutuhkan untuk mengkoordinasi dan mengarahkan kegiatan program kepada tujuan dan sasaran program di

dalam suatu organisasi. Keberhasilan program yang dilakukan dalam sebuah organisasi dapat ditentukan berdasarkan kualitas dan teknik komunikasinya. Oleh karena itu, suatu program dapat berjalan dengan efektif apabila komunikasi yang dilakukan memiliki teknik dan kualitas yang baik.

### **Pencapaian Tujuan**

Pengumpulan berkas peserta Program (BPUM) di Desa Huta Padang pertama kali dilakukan oleh Kepala Dusun dengan menyediakan formulir pendaftaran dan pengumpulan berkas-berkas pendaftar seperti fotokopi KK, KTP dan foto usaha di masing-masing Dusun di Desa Huta Padang. Formulir dan berkas-berkas yang telah dikumpulkan kemudian diberikan kepada pihak Kantor Kepala Desa Huta Padang untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan memeriksa berkas-berkas tersebut. Selain itu, Kantor Kepala Desa Huta Padang juga menyediakan surat keterangan izin usaha yang akan ditandatangani oleh Kepala Desa sebagai salah satu syarat yang harus diisi pada formulir pendaftaran untuk selanjutnya dikumpulkan bersama dengan berkas-berkas yang diberikan dari masing-masing Kepala Dusun dan terakhir dikirim kepada Dinas Koperasi dan Perdagangan di Kabupaten Asahan.

Adapun target sasaran untuk Program Ini di Desa Huta Padang adalah usaha kecil yang masih lemah perekonomiannya sehingga membutuhkan modal untuk mempertahankan usahanya di masa pandemi COVID-19. Namun, Kepala Dusun V mengatakan bahwa tidak hanya usaha kecil saja yang boleh mendaftarkan diri pada program Ini di Desa Huta Padang, melainkan usaha-usaha besar dan masyarakat yang kaya juga boleh untuk mendaftar pada program bantuan tersebut.

Namun, sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Dusun V tentang diperbolehkannya seluruh masyarakat yang mempunyai usaha untuk mendaftar mengakibatkan meledaknya

jumlah pendaftar di Desa Huta Padang. Jumlah pendaftar Program Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) di Desa Huta Padang yang sangat banyak disebabkan karena tidak dilakukan penyaringan dan pendataan oleh Kepala Dusun. Hal tersebut kemudian membuat seluruh masyarakat di Desa Huta Padang yang memiliki usaha baik kecil maupun besar tetap bisa mendaftar pada Program Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro di Desa Huta Padang.

Berdasarkan pemaparan pelaku usaha mikro di Desa Huta Padang, dapat diketahui bahwa banyak pelaku usaha mikro yang musiman di Desa Huta Padang. Pelaku usaha tersebut memanfaatkan kesempatan saat diberikan program (BPUM) di Desa Huta Padang untuk membuka usaha agar dapat mendaftarkan diri menjadi penerima Program (BPUM) di Desa Huta Padang. Usaha yang dibuka oleh pelaku usaha tersebut berdasarkan observasi peneliti ada usaha yang sangat minim modal sekali yaitu hanya menjual gorengan dengan tempat seadanya.

Pelaku usaha mikro di Desa Huta Padang mengartikan pelaku usaha musiman sebagai suatu usaha yang muncul hanya pada saat Program (BPUM) di Desa Huta Padang diberikan. Usaha yang dijalankan oleh Pelaku Usaha Musiman sebelum hadirnya Program Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) tidak ada sama sekali. Pelaku Usaha Musiman tersebut sebelumnya hanyalah seorang Ibu Rumah Tangga, Remaja Pengangguran dan Masyarakat yang tidak melakukan kegiatan jual beli sebelumnya. Bentuk usaha yang dijalankan oleh Pelaku Usaha Musiman di Desa Huta Padang yaitu berjualan gorengan, paket pulsa data internet, dan jualanan nasi gurih serta mie balap yang hanya menggunakan kursi dan meja serta tempat seadanya dalam melakukan kegiatan usahanya.



**Gambar. Usaha milik Pelaku Usaha Musiman**

Gambar di atas adalah salah satu foto usaha yang dipunya pemilik usaha musiman yang telah menerima Program (BPUM) di Desa Huta Padang. Namun, setelah menerima bantuan tersebut usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha musiman tersebut tidak berjalan lagi. Hal ini sesuai dengan pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Morinta di atas bahwa banyak pelaku usaha musiman yang muncul pada saat program Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) di Desa Huta Padang dilaksanakan.

Dari hasil pengamatan yang penulis lakukan di Desa Huta Padang terkait tujuan Program Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) yaitu benar adanya bahwa terdapat pemilik usaha mikro yang menerima Program (BPUM) adalah pelaku usaha musiman. Keberadaan pelaku usaha musiman tersebut tidak tertangkap oleh regulasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat pada saat pemilik rogram (BPUM) di Desa Huta Padang.

Komunikasi adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan Program Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) di Desa Huta Padang. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya komunikasi, para pengelola Program Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) di Desa Huta Padang dapat memahami apa yang harus mereka lakukan agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik. Pola komunikasi yang digunakan yaitu top down yaitu dari

atasan kepada bawahan yakni dari Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan menginformasikan peraturan dan persyaratan pelaksanaan Program ini kepada Kecamatan Bandar Pasir Mandoge kemudian diteruskan kepada bawahannya yaitu Kantor Kepala Desa Huta Padang.

Kepala Desa Huta Padang kemudian menyampaikan informasi kepada bawahannya yaitu perangkat desa dan Kepala-Kepala Dusun di setiap Dusun di Desa Huta Padang. Kemudian Kepala Dusun menyampaikan informasi program Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) di Desa Huta Padang kepada masyarakat yang memiliki usaha mikro di Desa Huta Padang. Kejelasan tujuan dan sasaran program dapat dipahami oleh pengelola program dan masyarakat Desa Huta Padang sehingga dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan Program (BPUM) di Desa Huta Padang. Oleh karena itu, pengelola (BPUM) di Desa Huta Padang harus menyadari pentingnya komunikasi yang baik dalam pencapaian tujuan program yang dilaksanakan.

Proses penyampaian informasi antara pengelola program dengan masyarakat di Desa Huta Padang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi program yang dikerjakan Kepala Desa, pegawai desa dan semua Kepala Dusun. Sosialisasi program adalah sebuah langkah awal yang dapat menentukan keberhasilan program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sosialisasi program harus dilakukan agar segala informasi terkait suatu program dapat tersampaikan dan dapat dipahami oleh seluruh masyarakat sehingga tujuan program dapat tercapai dengan baik. Sosialisasi program dilakukan secara sistematis dengan memberdayakan sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi agar dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan. Berdasarkan Peraturan Menteri No.98 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan BPUM disebutkan pada Bab II Huruf (B) yaitu dalam rangka pelaksanaan BPUM Deputi penanggungjawab program menyusun

materi sosialisasi pelaksanaan kegiatan BPUM untuk disampaikan kepada masyarakat. Penyampaian informasi BPUM kepada masyarakat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Dalam hal penyampaian informasi secara langsung dilakukan dengan cara kunjungan ke daerah. Dalam penyampaian informasi secara tidak langsung dapat dilakukan dengan memanfaatkan media baik media tulis, elektronik, maupun sosial media.

Berdasarkan Permenkop dan UKM No. 98 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan BPUM, sosialisasi program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan adalah dengan metode sosialisasi secara langsung kepada seluruh Kecamatan di Kabupaten Asahan. Sosialisasi program yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan kepada Kecamatan dan Desa yang diamanahkan bertujuan untuk mendata peserta program Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) di Kabupaten Asahan. Sosialisasi terkait Program Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) di Desa Huta Padang dilakukan oleh Kepala Desa Huta Padang dan Kepala Dusun di Desa Huta Padang. Pemerintah desa mengundang semua Kepala Dusun di Desa Huta Padang, Tokoh-Tokoh masyarakat Desa Huta Padang melalui seluruh Kepala Dusun di masing-masing dusun di Desa Huta Padang dan tokoh-tokoh masyarakat di Desa Huta Padang. Proses penyampaian sosialisasi Program Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) kepada masyarakat dilakukan Kepala Dusun secara terbuka dari rumah ke rumah masyarakat.

## SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge mengenai Efektivitas Program Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM)

kepada Pelaku Usaha Terdampak COVID-19 di Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge belum berjalan dengan baik sesuai dengan indikator efektivitas yang harus dipenuhi. Alasannya yaitu, ketepatan sasaran program belum tercapai dengan pembagian tugas yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Huta Padang dikarenakan tidak dilakukan pendataan oleh Kepala Dusun dan lebih mendahulukan kepentingan kekeluargaan, klim organisasi di pemerintahan Desa Huta Padang belum berjalan efektif karena kurangnya komunikasi yang baik antar perangkat desa dan fasilitas yang kurang memadai di dalam Kantor Kepala Desa. Selain itu, Kebijakan Praktek Manajemen terkait pencapaian tujuan program BPUM di Desa Huta Padang masih belum efektif karena masih banyak pelaku usaha mikro yang memenuhi kriteria tetapi tidak menerima Program BPUM tersebut dan sebaliknya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Bungin. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Putra Grafika.

Steers, Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi*, diterjemahkan Magdalena Jamin. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Sutrisno, Edy. 2007. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana

### Skripsi:

Swarlina, Wiwien. 2021. *Efektivitas Program Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro kepada Pelaku Usaha Terdampak COVID-19 di Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge*. Medan: USU.

### Jurnal:

Bahtiar, R.A. (2021). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Solusinya. *Jurnal Bidang Ekonomi*

*dan Kebijakan Publik.* Vol.13 (10): 20

Budiani, Ni Wayan. (2007). “ Efektivitas Program Penanggulangan Karang Taruna (Eka Taruna Bhakti) Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar”. *Jurnal Ekonomi dan Sosial.* Vol. 2 (1): 07.

Khofifah, N. (2020). Dampak COVID-19 Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)( Studi Kasus UMKM Ikhwa Comp Desa Watesprojo, Kemlagi, Mojokerto). *Jurnal Inovasi Penelitian.* Vol.1 (7): 1328.

**Regulasi:**

Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah No. 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

**Internet :**

Andini, R. 24 Juni 2021. Heri Gunawan: PelaksanaanBPUM Banyak Ditemukan Penyimpangan. <https://politik.rmol.id/read/2021/06/24/493613/heri-gunawan-pelaksanaan-bpum-banyak-ditemukan-penyimpangan>.

Daulay, R. 17 September 2020. Penerima BLT UMKM Keewa, Disyaratkan Saldo Rekening Minimal Rp 2 Juta. <https://mudanews.com/sumatera-utara/2020/09/17/penerima-blt-umkm-kecewa-disyaratkan-saldo-rekening-minimal-rp-2-jt/>

Fadila, R.U. 09 Mei 2020. 1785 Koperasi

dan 163.713 UMKM Terdampak Covid-19. <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-01379615/1785-koperasi-dan-163713-umkm-terdampak-pandemi-covid-19>

Fikri, Chairul. 5 Februari 2021. Tiga Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Perekonomian Nasional. <https://www.beritasatu.com/ekonomi/728997/tiga-dampak-pandemi-covid19-bagi-perekonomian-nasional>

Katadata. 2020. Digitalisasi UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. <https://katadata.co.id/umkm>.

Rezkisari, I. 25 Agustus 2020. Banpres Produktif UMKM yang Dinilai tidak Tepat Sasaran. <https://republika.co.id/berita/qflme5328/banpres-produktif-umkm-yang-dinilai-tidak-tepat-sasaran>

Sentralberita. 12 Agustus 2020. Warga di Asahan Bingung Soal Bantuan Pelaku Usaha Mikro, Ini Jawaban Kadis Koperasi. <https://sentralberita.com/2020/08/warga-di-asahan-bingung-soal-bantuan-pelaku-usaha-mikro-ini-jawaban-kadis-koperasi/>

Tobing, S. 24 Agustus 2020. BLT Rp 2, Juta diluncurkan, Bagaimana Kondisi UMKM di Tengah Pandemi?. <https://katadata.co.id/sortatobing/finansial/5f435c52b1943/blt-rp-2-4-juta-diluncurkan-bagaimana-kondisi-umkm-di-tengah-pandemi>

Wareza, M dan Putri, C.A. 17 Agustus 2020. Pemerintah Klaim Sudah Cairkan BLT ke 700 Ribu UMKM. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200817225145-4-180372/pemerintah-klaim-sudah-cairkan-blt-ke-700-ribu-umkm>